

BAB V

SIMPULAN DAN ARAHAN

Negara-Manusia, melampaui analogi

Yang ingin penulis tekankan dari rekonstruksi singkat akan psikogenealogi 'kedaulatan' ini adalah bahwa gagasan kedaulatan semata-mata hanya merupakan kendaraan bagi suatu fantasi tentang ke-diri-an ideal bagi raja yang notabene mustahil. Dengan kata lain, bagi raja, kerajaan dan berikutnya negara modern merupakan suatu tubuh-super yang lebih berkuasa darinya, suatu tubuh makro yang lebih besar darinya. Jadi, raja menganggap kerajaannya dan berikutnya negara berdaulat sebagai sebuah manifestasi *diri* ideal, yang di dalamnya tersimpan fantasi ke-diri-an ideal yang didambakan raja. Sehingga dari pemahaman ini, negara adalah orang besar, "*state is person*," dengan catatan bahwa "orang" dipahami sebagai suatu gagasan. Raja Perancis Louis XIV mengatakannya dengan baik, "*L'etat c'est moi*", negara adalah aku. Kata "aku" merupakan sebetuk subyektivitas. Dan kata "aku" yang dimaksudkan di sini, adalah "aku" yang berdaulat. Hal ini pada gilirannya mengklarifikasi tesis makro-subyektivitas manusia-negara seperti yang penulis bahas di awal bab ini. Makro-subyektivitas bukanlah analogi! Makro-subyektivitas manusia-negara memiliki landasan imanen, yaitu kegelisahan eksistensial. Efek metafisik dari tesis makro-subyektivitas ini sebenarnya adalah buah dari kelembaman teoritik untuk memperluas "pisau" analisisnya yang secara turun-temurun diderita kebanyakan penstudi HI.

Implikasinya, bukan malah mengkonfirmasi teori-teori yang telah salah kaprah menganalogikan negara sebaga manusia. Jauh lebih dalam dari itu, implikasi pandangan penulis ini adalah bahwa analisis negara tidak dapat dipisahkan dari analisis manusia. Hasrat negara, pada akhirnya akan diarahkan untuk memperkuat eksistensi ke-diri-annya yang terepresentasi dalam gagasan kedaulatan. Meminjam Freud, seluruh aktivitas negara, dengan demikian adalah aktivitas ekonomi hasrat—usaha-usaha memuaskan hasrat.

Paradoks kedaulatan

Hal ini akan dapat memahami pula paradoks yang akan selalu mengiringi negara-berdaulat. Semenjak kedaulatan adalah sesuatu yang mustahil, negara-berdaulat, karena ia merupakan manifestasi makro dari hasrat manusia akan diri ideal, maka ia juga mengidap mikrofasisme yang mengiringi sejarah umat manusia. Saat kegelisahan muncul, negara-berdaulat akan mati-matian mempertahankan eksistensinya yang sama sekali simbolik. Apabila kesinambungan kedaulatan itu didasarkan pada suatu identitas primordial, maka identitas ini akan dipertahankan mati-matian demi menjaga keberadaan kedaulatan tersebut. Apabila kedaulatan tersebut didasarkan pada suatu agama, maka agama tersebut akan dipertahankan mati-matian. Upaya mempertahankan ini tidak jarang dengan kekerasan semenjak fasisme selalu mengiringi perjuangan hasrat subyek. Fasisme akan rela memperjuangkan apa saja yang berguna bagi kesinambungan eksistensinya, ia akan rela menyakiti siapa saja termasuk dirinya demi menjaga kedaulatannya yang ilusif itu. Saat negara melihat, misalnya, kedaulatan dapat didapat dari Komunisme, maka ia akan mati-matian memperjuangkan Komunisme tersebut tegak di negaranya, ia rela menyakiti bahkan rakyatnya sendiri yang membangkang. Fasisme akan selalu mensyaratkan sebetuk alienasi dari diri sendiri kepada penguasaan Simbolik tertentu. Kekerasan hati akan suatu bentuk Simbolik kedaulatan tersebut, dengan demikian merupakan suatu kekerasan pada diri.

Logika kedaulatan: komodifikasi kedaulatan dan abyeksi

Melalui studi ini ditunjukkan bahwa Perjanjian Westphalia 1648, yang ternyata merupakan Skandal, merupakan kelanjutan upaya raja untuk mempertahankan kekuasaannya seperti yang telah dilakukannya terlebih dahulu dengan teologi politik bernama Doktrin Dua Tubuh (dan Dua Pedang). Apabila melalui doktrin tersebut raja berusaha mengamankan *posisi* atau *kedudukannya* sebagai penguasa, maka melalui Perjanjian Westphalia, raja ingin melanjutkannya dengan mengamankan *lingkup* kekuasaannya. Jadi apabila dengan mentransubstansiasikan diri (*corpus naturale*) ke tubuh mistik politik (*corpus*

mysticum politicum), raja bermaksud menjamin kelangsungan penguasaan transendennya melalui sukseksi imanen dinastinya, maka melalui Perjanjian Westphalia maka raja bermaksud melakukan transubstansiasi jilid ke-2: transubstansiasi subyektivitas modern yang telah terlebih dahulu diakuisisinya sebagai subyektivitas, menjadi negara yang bercirikan seperti subyek modern tercerahkan: rasional dan otonom.

Raja amat menjunjung fantasi ideal tentang eksistensinya ini. Bahkan ia rela melakukan apapun demi mempertahankan eksistensi tersebut, dan memang dalam hal ini Machiavellianisme merupakan suplemen inspirasi yang penting. Hanya saja, yang penulis ingin tekankan adalah bahwa tanpa ada karya-karya bernada otoritarian dan absolutis *a la* Machiavelli, Guicciardini dan Bodin, telah terlebih dahulu terdapat dorongan agresif dan fasis dalam diri raja untuk senantiasa mengupayakan fantasi idealnya, bagaimanapun caranya. Raja mengkomodifikasi universalitas-universalitas seperti kesejahteraan rakyatnya, persatuan nasional (dengan tuan tanah), bahkan Tuhan untuk melandasi eksistensi kedautannya. Dengan kata lain, komoditas kedaulatan adalah kondisi esensial bagi kedaulatan raja; sama seperti komodifikasi kedaulatan adalah aktivitas tak terelakkan dari segala bentuk pemerintahan raja.

Semenjak kedaulatan selalu membutuhkan justifikasi Simbolik universal, maka dapat dipahami pula fitur lainnya pada kedaulatan, yaitu aktif dalam mengkomodifikasi universalitas bagi kesinambungan eksistensinya. Seluruh aktivitas kenegaraan, dengan demikian bukanlah suatu tindakan yang dilakukan demi warga-negara, melainkan demi *status quo* sang raja dan dinastinya sebagai penguasa warga-negara. Jargon-jargon universal dipakai hanya untuk merayu legitimasi dari rakyatnya. Jadi, apabila janji negara di wujudkan, maka ia adalah suatu perbuatan yang berdasar pada kalkulasi kedautannya. Semisal negara berusaha mengentaskan kemiskinan, maka hal itu dilakukan bukan demi pengentasan kemiskinan rakyatnya, melainkan demi *eksistensi*-nya sebagai pengentas kemiskinan, dan demi menjaga kepercayaan dan legitimasi rakyatnya yang berguna untuk melestarikan *status quo*

negara sebagai penguasa. Status universalitas bagi negara berdaulat tidak lain adalah komoditas kedaulatan, yaitu segala bentuk obyek yang dapat dijadikan landasan pembenar bagi setiap perjuangan kedaulatan.

Semenjak aktivitas negara adalah mengkomodifikasi universalitas, maka secara otomatis juga ia akan secara aktif memproduksi abyek-abyek yang dianggapnya membahayakan sistem universal nilainya. Paranoia yang mengiringi kegelisahan subyek berdaulat, diarahkannya pada aktivitas memproduksi abyek. Aktivitas ini bisa dibilang sebagai suatu katarsis, yaitu pelepasan dan penenangan kegelisahan. Dengan menunjuk abyek yang senantiasa mengancam sistem nilainya, negara memiliki musuh yang kelihatan untuk dilawan. Sebaliknya, saat musuh tersebut tidak ada, maka tidak ada yang akan menopang universalitas—dalam hal dikorbankan demi universalitas tersebut. Proses pembentukan subyek (subyeksi) kedaulatan melalui suatu wacana universal, sebagaimana telah penulis singgung, akan selalu mensyaratkan proses abyeksi, yaitu penolakan radikal akan entitas-entitas yang mewakili gagasan kontra-tatanan, non-subyek, singkatnya sesuatu yang tidak diinginkan oleh sistem tatanan. Apabila abyek tersebut tidak ada, maka ia akan diciptakan dan dikonstruksikan untuk berikutnya dipinggirkan.

Kedua aktivitas inilah yang pada gilirannya akan membuat negara-berdaulat menjadi suatu hal yang wajar dan normal. Gestur kedaulatan dalam mengkomodifikasi nasionalisme dan kewarganegaraan misalnya merupakan upaya negara untuk menjangkarkan kedaulatan pada landasan yang universal dan permanen. Karena dianggap sebagai sesuatu yang normal, masyarakat pun justru disulap menjadi garda depan penjaga kedaulatan negara. Inilah yang disebut Gramsci, seperti yang sudah penulis bahas di awal, sebagai suatu bentuk statolatri. Imajinasi untuk membayangkan masyarakat tanpa negara, pada akhirnya menjadi suatu hal yang mustahil.

Kedaulatan Global: Kedaulatan Kontemporer?

Penulis berikutnya menguji tesis ini pada kasus kedaulatan di era kontemporer, yaitu praktik kedaulatan AS dalam Perang Global melawan Terorisnya (*Global War on Terrorism, GWOT*). Kebijakan AS dalam memerangi terorisme bukanlah merupakan sebuah kerangka politik luar negeri semata, melainkan merupakan perjuangan AS untuk memulihkan kedaulatan dan kedigdayaannya yang runtuh pasca serangan teroris 9/11 ke gedung kembar WTC dan Pentagon. Pemulihan kedaulatan AS ini, yang dilakukan melalui tindakan sewenang-wenang dan semi-otoriter tidak hanya kepada warga negaranya sendiri tetapi juga kepada seluruh dunia, menandakan suatu transformasi baru dalam konsepsi kedaulatan yang sama sekali baru dan lebih mutakhir ketimbang versi Westphalia-nya, yaitu suatu ‘kedaulatan global’ yang menjadikan atmosfer bumi sebagai penanda batas kedaulatan, sehingga seluruh dunia menjadi teritori “domestik”-nya, dan seluruh ruang angkasa menjadi wilayah “luar”-nya. Dengan kata lain, dalam kedaulatan global, batas teritori yang sesungguhnya tidak berada *di* bumi, melainkan di ambang batas antara bumi dengan ruang angkasa beserta benda-benda angkasa lainnya.

Sampai di sini nampak jelas kiranya bahwa kegelisahan sebagai efek ketidak-jelasan teritori dan otoritas di Eropa Pertengahan, kini menyaksikan kontemporalitasnya pada kegelisahan paranoid AS pasca kedigdayaannya diruntuhkan teroris melalui even 9/11. Sama seperti raja-raja yang dirundung ketidak-pastian karena tumpang tindih otoritas kekuasaan di Eropa saat itu, begitu pula AS dirundung ketidak-jelasan akan siapa musuhnya. Kedua bentuk ketidak-pastian dan ketidak-jelasan ini, baik yang di alami raja dan AS, sama-sama membawa kepada suatu kegelisahan akan kesinambungan, keamanan dan kenyamanan ontologi eksistensialnya. Dengan ketidak-pastian ini, ke-diri-an ideal raja dan AS terancam keberadaannya. Akhirnya, raja-raja ini berupaya menenangkan kegelisahan tersebut dengan mengidentifikasi diri pada fantasi-fantasi ideal akan suatu ke-diri-an yang utuh yang sebagaimana penulis telah tunjukkan, didapatnya dari Tuhan, dan kemudian subyektivitas modern Eropa yang merupa dalam gagasan kedaulatan

negara. Melalui gagasan kedaulatan, raja akhirnya mendapat ‘diri’-nya yang baru. Hal serupa juga terjadi pada AS, ia juga mengkonstruksi suatu fantasi akan ke-diri-an yang ideal ini yang tersirat dalam apa yang penulis sebut kedaulatan globalnya.

Melalui pembahasan ini penulis ingin menekankan bahwa praktik kedaulatan global *a la* AS ini merupakan suatu implikasi logis dari setiap negara yang mengakuisisi kedaulatan sebagai “perangkat lunak” utamanya, yang olehnya seluruh praktik kenegaraan berdasar. Semenjak gagasan Kedaulatan didasarkan pada gagasan subyektivitas modern Eropa yang narsistik dan fasistik, maka secara *by-default* gagasan Kedaulatan juga mau tidak mau akan bersifat serupa.¹ Narsisme akan mewujud dalam hasrat untuk terus-menerus menjaga, memperkuat, atau memulihkan kemapanan (*status quo*) identitas diri; sementara fasisme akan mewujud dalam ekspansionisme agresif abadi untuk terus-menerus memperluas ruang kekuasaan dirinya yang tujuannya tak lain adalah narsistik—menjaga kesinambungan eksistensi/identitas diri. Tidak ada titik akhir bagi perjuangan narsisme dan fasisme; yang ada hanyalah titik jeda (*break*) di antara “seri perjuangan” yang satu dengan yang lainnya. Seri perjuangan kedaulatan di mana AS berada pada saat ini, sebenarnya merupakan tahapan yang akan dilalui oleh setiap negara berdaulat—pengecualian jika negara tersebut keburu punah pada salah satu seri perjuangannya. AS menjadi istimewa bagi penulis karena ia telah berada pada titik paling maju (*advance*) dari seri evolusi kedaulatan, di banding negara-negara lainnya, setidaknya sampai hari ini.

Dari pandangan inilah menjadi tidak relevan untuk menyebut kedaulatan AS tersebut sebagai suatu kedaulatan kontemporer. Secara paradigmatik, praktik kedaulatan AS masih merupakan upaya mempertahankan bahkan merelevankan kedaulatan Westphalia di era kontemporer. Tidak ada yang berubah dari sendi-sendi dasar kedaulatan yang diperjuangkan AS melalui kebijakan GWoT-nya. Dengan kata lain, kontemporalitas kedaulatan hanya sampai pada taraf bentuk penampakannya—

¹ Lihat pembahasan pada Bab III.

dari negara-berdaulat ke imperium global—dan tidak menjangkau ide-ide dasarnya. Motivasi berdaulat pun masih belum bergeser dari versi Skandal Westphalia, yaitu kerinduan akan kontrol *fix* atas teritori yang dipicu oleh ketidak-menentukan otoritas dan teritori. Dengan demikian, istilah kedaulatan kontemporer agaknya kurang tepat untuk menamai fenomena praktik kedaulatan AS ini. Kedaulatan kontemporer, dalam gaya dekonstruksi Derridean, adalah selalu kedaulatan ~~kontemporer~~.²

Namun demikian, hal penting yang perlu ditekankan bahwa kedaulatan global ini bukanlah menandai pergeseran paradigma (*paradigm shift*) kedaulatan itu sendiri. Paradigma kedaulatan belum berubah semenjak Skandal Westphalia 1648; dan menurut penulis, ia nampaknya tidak akan berubah untuk sekitar satu milenium mendatang. Kekeliruan dalam melihat kontinuitas ini sebagai pergeseran, menurut penulis bukanlah suatu isu sepele. Akibat yang dapat penulis ramalkan ada dua: 1) kedaulatan negara akan dipandang sebagai sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja, dan dengan demikian mengabaikan proses kelahirannya berikut ekses yang melekat padanya, yang nantinya akan mengemuka pada tahap “dewasa”-nya. Akhirnya, wajah beringas kedaulatan akan dipandang sebagai pelencengan terhadap gagasan mulia tentang kedaulatan, padahal sebaliknya, wajah beringas tersebut adalah wajah asli dari kedaulatan. Singkatnya, negara berdaulat bermasalah bukan karena orang-orang yang duduk di pemerintahannya jahat. Sebaliknya, negara berdaulat itu jahat karena ia memang bermasalah sejak awalnya.³ 2) Apabila kedaulatan tidak pernah mengalami suatu proses kelahiran, alih-alih, dilihat sebagai sesuatu yang terberi begitu saja, maka seluruh dimensi emansipatoris, apalagi perlawanan, akan tertutup rapat-rapat. Tidak akan ada ruang bagi perjuangan melawan sang berdaulat—dan penulis amat sangat *senewen* dengan ini!—sampai kedaulatan dipahami dan

² Gaya penulisan ini disebut Derrida sebagai *sous rature* (*under erasure*). Tujuan dari gaya ini, yaitu dengan mencoret suatu kata, adalah menunjukkan bahwa kata tersebut adalah tidak relevan secara makna, melainkan perlu tetap diafirmasi keberadaannya yang performatif sebagai suatu “jejak kehadiran.” Lihat Gayatri Spivak, “*Translator’s Preface*,” dalam J. Derrida, *Of Grammatology*, hal. Xvii.

³ Permainan kata ini terinspirasi dari teman baik penulis Martin Suryajaya, saat mengatakan bahwa “[bukan] kapitalisme itu bermasalah karena ia jahat. [K]apitalisme itu jahat karena ia bermasalah, dan bukan sebaliknya.”

dibuktikan genesis kelahirannya. Sesuatu yang dilahirkan, pasti bisa dibunuh. Demikian pula kedaulatan, semenjak ia juga dilahirkan, maka ia bisa dibunuh. Sehingga kesalahan paling fatal dalam memandang kedaulatan, adalah dengan mengatributkan predikat ‘imortal’ kepadanya!⁴

oOo

Arahan penelitian lebih lanjut

Satu celah yang penulis sadari dalam studi ini yaitu terdapat pada lompatan zaman yang begitu besar pada “obyek” studi penulis. Secara spesifik, pada bab III penulis bekerja pada konteks zaman Eropa Abad Pertengahan, sekitar Abad 11-17. Sementara pada bab IV, penulis bekerja pada konteks era kontemporer. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa studi ini akan mengabaikan perkembangan yang terjadi selama kurun 4-5 abad setelah Skandal Westphalia. Padahal banyak perjanjian (atau mungkin skandal juga) yang menjadi *corner stone* bagi perkembangan gagasan kedaulatan itu sendiri, seperti Perjanjian Utrecht, Konvensi Wina, Konvensi Montevideo, konvensi UNCLOS, dst. Perkembangan-perkembangan dalam perjanjian ini penulis yakin memberi dampak modifikatif dalam gagasan kedaulatan Westphalia. Sekalipun, sebagaimana telah penulis buktikan pada praktik kedaulatan AS, inti dari kedaulatan tersebut tidaklah berubah: pemuasan hasrat akan ke-diri-an ideal. Sehingga di akhir diskusi ini, penulis akan sangat menganjurkan untuk memperbanyak penelitian serupa, hanya kali ini dengan menganalisis situasi di abad 17-21, mengeksplor gagasan-gagasan kedaulatan teritorial *a la* Emer Vattel, kedaulatan populer ala Rousseau, dan tentunya yang sangat signifikan secara

⁴ Carl Schmitt merupakan contoh buruk tentang teorisasi perlawanan terhadap sang berdaulat. Dengan melihat kedaulatan sebagai aktivitas “*God-like*,” dan dengan demikian seluruh konsep-konsep kenegaraan sebagai “*secularized theological concept*,” maka Schmitt telah menihilkan seluruh kemungkinan perlawanan. Bdk. Carl Schmitt, *Political Theology: Four Chapters on the Concepts of Sovereignty*, terj. George Schwab (Cambridge: MIT Press, 1985). Namun demikian, sisi positif Schmitt, dari perspektif perlawanan tentunya, bahwa yang teologis (*theological*) adalah selalu merupakan hasil dari proses sekularisasi (*secularized*), bahwa yang sakral adalah selalu merupakan bungkus dari suatu profanitas. Implikasinya sederhana: Tuhan, apapun sebutan dan manifestasinya, sebenarnya bisa dibunuh!

kontemporer, adalah hubungan kedaulatan dengan sebuah mitos bernama “globalisasi.” Penelitian-penelitian ini amat penting, setidaknya menurut penulis, bagi siapapun yang ingin memahami dan bahkan mendesain perubahan bertaraf global. Perubahan global tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa perubahan fundamental di dua titik utama kedaulatan: negara dan kepala fasis kita. Terima kasih.

